

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai keragaman sumber daya alam, sumber daya manusia, kebudayaan dan bahasanya. Namun, kekayaan Indonesia yang melimpah ini disertai dengan berbagai masalah yang berat, salah satunya adalah masalah kependudukan. Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Amerika Serikat dengan predikat negara dengan jumlah penduduk terbesar. Masalah kependudukan tersebut meliputi kualitas penduduk, kuantitas penduduk, persebaran penduduk, dan masalah administrasi penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi membuat masalah kependudukan Indonesia menjadi semakin kompleks, salah satunya yaitu bertambah banyaknya pengangguran. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengadakan program Keluarga Berencana atau KB dan pemberdayaan UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas.

Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Prof. Firmansyah, saat ini sektor UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dari sisi jumlah unit usaha yang mencapai 99% dari total pelaku usaha nasional pada tahun 2012. Sebanyak 54.559 unit usaha atau 98,82% diantaranya merupakan usaha mikro dengan aset maksimal Rp 50.000.000 dan omzet per tahun maksimal Rp 300.000.000. Kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB atau Produk Domestic Bruto Nasional menurut harga berlaku tercatat mencapai 57%. Sisanya dikontribusikan oleh usaha besar mencapai

43%. dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat ini peran UMKM tidak dapat diragukan lagi karena selain dapat menyumbang PDB berdasarkan harga berlaku tersebut, sehingga UMKM sangat diperlukan oleh Indonesia terutama mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, UMKM mampu menyerap 97,30% tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut pemerintah terdorong untuk memberdayakan pengembangan UMKM. Salah satunya dibuktikan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Nusa Dua Bali pada 7-8 Oktober 2013 dimana Indonesia memprakarsai pembahasan penguatan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan ketahanan regional yang kokoh. Hal ini diambil baik oleh 22 anggota APEC sehingga dalam KTT APEC tersebut menghasilkan 7 inti pokok kerjasama salah satunya yaitu para pemimpin anggota APEC bersepakat untuk memfasilitasi UMKM, pengusaha perempuan dan pengusaha muda (kompas, 24 oktober 2013).

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan selain dari sisi pemerintah adalah dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan non bank khususnya lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT. Saat ini masalah besar yang sedang dihadapi oleh UMKM dalam aspek keuangan, karena masalah keuangan dapat membuat pelaku usaha mikro

menjadi bangkrut. Sehingga dalam hal ini keberadaan BMT sangat diperlukan bagi UMKM karena BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dianggap cocok untuk para pelaku UMKM yang dapat menjangkau pelaku UMKM paling bawah. Disisi lain BMT juga memiliki kekuatan, dimana eksistensi BMT memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia. Disisi lain BMT juga memiliki kekuatan, dimana eksistensi BMT memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia.

Salah satu rival BMT dalam mengembangkan usahanya tidak lain adalah rentenir, rentenir dalam prakteknya sebenarnya sangat merugikan peminjamnya karena jasa keuntungan rentenir tersebut cukup besar, sehingga bagi UKM/pedagang khususnya menggunakan kredit-kredit yang disediakan oleh para rentenir dalam dua cara, tergantung pada jangkauan aktifitas. Hutang piutang uang informal sangat sesuai dengan kebutuhan para pedagang skala besar yang harus membeli barang dalam jangka waktu pendek. Tetapi apabila pembayar kreditnya tidak sanggup membayar maka jangka waktu pembayaran kreditnya diperpanjang sehingga keuntungan semakin besar dan menambah beban bagi yang meminjamnya. Maka BMT disini mampu memudahkan masyarakat bawah yang ingin membangun usaha dan menambah modalnya dan supaya terhindar dari praktek negatif rentenir dan lebih utama supaya terhindar dari riba.

Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai kehendak dari budaya kita, kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.

Munculnya lembaga keuangan yang berbasis syariah (semacam BMT) merupakan suatu fenomenal yang unik. Oleh karenanya sangat penting untuk di ketahui lebih lanjut, agar jika di ketemukan konsep-konsep strategi bagi ketahanan ekonomi masyarakat yang tangguh, kiranya dapat disebarluaskan, dan dalam upaya maksud diatas, penulis tertarik untuk meneliti BMT. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “ **PENGARUH PEMBIAYAAN BMT TERHADAP PRAKTEK RIBA OLEH RENTENIR PADA UMKM (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Sleman)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berbicara mengenai BMT, sangat luas cakupannya karena BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Selain bergerak dalam bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan disektor riil dimana BMT menyalurkan dananya kepada pengusaha kecil bawah dan kecil. Bertitik-tolak dari latar belakang seperti tersebut diatas, kiranya dapat dirumuskan pokok persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan BMT terhadap praktek riba oleh rentenir pada UMKM (Pedagang Pasar Sleman)?

Selanjutnya dalam upaya memperoleh hasil secara mendalam dan memadai, penelitian ini di fokuskan pada strategi BMT saja.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan BMT terhadap praktek riba oleh rentenir pada UMKM (Pedagang Pasar Sleman).
- b. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :
 1. Menambah wawasan keilmuan tentang peran pembiayaan BMT terhadap praktek riba oleh rentenir pada UMKM.
 2. Mendeskripsikan peran pembiayaan BMT sebagai lembaga keuangan alternatif sesuai syariah yang membantu masyarakat (pedagang) menengah ke bawah dan dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ekonomi masyarakat.
 3. Bagi pihak BMT untuk lebih meningkatkan strategi untuk kinerja usahanya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Hipotesis Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Berisikan metode studi pustaka terhadap penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya serta teori-teori yang menjelaskan sehingga dijadikan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dan metode analisisnya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan dari penelitian dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.